
SIMULASI PERUMUSAN PRIORITAS PROGRAM KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT DUSUN KARYA HARAPAN MUKTI MENUJU TAHUN 2022 KECAMATAN PELEPAT ILIR KABUPATEN BUNGO

Mulia Jaya^{1*} dan Tri Martial²

¹Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

²Prodi Social Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Medan Area

*Email: muliajaya80.umb@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup di Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Fokus utama pengabdian ini adalah pada simulasi perumusan prioritas program kerja yang melibatkan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat. Melalui pendekatan partisipatif, interaktif, dan analitis, diharapkan dapat menghasilkan rencana aksi yang berdaya saing dan relevan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat menuju tahun 2022.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pengabdian ini adalah kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif. Partisipasi aktif masyarakat, wawancara mendalam, dan observasi langsung digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif, sementara survei dan analisis statistik digunakan untuk data kuantitatif. Tim pengabdian juga melakukan workshop interaktif dengan perwakilan dari Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat untuk merumuskan prioritas bersama.

PENDAHULUAN

Menurut kriswanto (2021) Umumnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan di desa adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan;
2. Terbatasnya aksesibilitas dan rendahnya kualitas layanan pendidikan;
3. Terbatasnya aksesibilitas dan rendahnya kualitas layanan kesehatan;
4. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha;
5. Terbatasnya aksesibilitas layanan perumahan dan sanitasi;
6. Terbatasnya aksesibilitas layanan air bersih;
7. Besarnya beban tanggungan keluarga; dan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender;
8. Lemahnya jaminan rasa aman;
9. Terbatasnya sarana dan prasarana wilayah;
10. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah;

11. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya aksesibilitas sumber daya alam;
12. Lemahnya partisipasi.

Permasalahan tersebut, perlu dilakukan pemetaan dan evaluasi sehingga solusi yang dirumuskan, melalui pendekatan yang ada, dapat membantu percepatan pembangunan desa. Salah satunya ialah pendekatan pemberdayaan.

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Dusun dengan tema, Literasi Keuangan Desa Dalam Perspektif Harmonisasi Gerak Antar Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dilaksanakan tanggal 28 Desember 2021. Berlokasi di Balai Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Peserta terdiri dari beberapa kelembagaan yakni Perangkat Dusun, Badan Permusyawaratan Dusun, Lembaga Adat Melayu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna, Kaum, PKK, Posyandu, PAUD dan RT. Total jumlah peserta sebanyak 92 orang.

Memaknai kegiatan ini sebagai manifestasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Masyarakat dan Lembaga Adat Desa. Harmonisasi yang dicita-citakan ialah dimana setiap kelembagaan dalam lingkup pemerintahan dusun karya harapan mukti dapat berkolaborasi, berpartisipasi serta bersinergi *vertical* maupun *horizontal* dalam perencanaan pembangunan dusun, menghadapi tantangan di tahun 2022.

Melalui kegiatan ini, terbangun kesamaan perspektif, sehingga hubungan kelembagaan dusun karya harapan mukti dapat terarah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja. Semakin terarah hubungan kelembagaan tersebut, semakin meningkat pula *capacity building* kelembagaan dalam menjawab masalah sosial dan pembangunan pada tahun 2022.

PEMBAHASAN

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau seke-lompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Berdasarkan pengertian tentang kebijakan yang telah diurai-kan diatas maka dapat di- simpulkan bahwasanya kebijakan dapat dilaku- kan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku Negara pada umum-nya yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan Negara atau kebijakan publik (*public policy*) (Hasan Basri 2022). Akan tetapi formulasi kebijakan perlu melibatkan beragam pihak pemangku kepentingan.

Partisipasi masyarakat dimaknai sebagai keikutsertaan sekelompok anggota masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan ling- kungan (Mikkelsen, 2003 dalam hasan basri, 2022). Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan

masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Identifikasi potensi dapat dilakukan melalui bermacam model diantaranya simulasi.

Partisipasi masyarakat merupakan prakarsa dan swadaya gotong royong yang merupakan ciri khas dari kepribadian bangsa Indonesia. Prakarsa yang berarti kemauan, kehendak atas hasrat, sedang swadaya gotong royong yang berarti kemampuan, kekeluargaan, sehingga perlu diorganisasi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan dalam setiap tahapan pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Hal tersebut karena keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasar pada kemampuan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan. Namun, masalah yang muncul di kalangan masyarakat yaitu sering dikecewakan oleh program pembangunan sebelumnya, sehingga mereka cenderung curiga terhadap program pembangunan selanjutnya.



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Narasumber **Gambar 2.** Proses penyampaian Materi

Partisipasi masyarakat adalah sebagai bentuk keterlibatan anggota masyarakat dalam seluruh pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk partisipasi merupakan penunjang keberhasilan program yang di berikan oleh pemerintah (Agustin, 2016; Winarni et al., 2019). Pemerintah menginginkan agar proses pembangunan digagas dari bawah. Ada beberapa persoalan yang menyebabkan Musrenbang tidak efektif. Pertama, prinsip partisipasi rakyat dalam proses Musrenbang sangat minim. Kedua, prinsip responsive, Musrenbang kurang ditopang oleh pembangunan organisasi-organisasi rakyat. Demokrasi tidak mungkin berdiri tanpa adanya rakyat yang terorganisir. Ketiga, prinsip holistic, proposal Musrenbang sering *disabotase* oleh birokrasi korup peninggalan kolonialisme. Dalam banyak kasus, proposal Musrenbang dari desa tidak diwakili oleh delegasi yang ditunjuk rakyat. Akan tetapi, pada tingkat desa, forum Musrenbang berpotensi dimajukan oleh gerakan rakyat. Asalkan bisa membangkitkan partisipasi rakyat di dalamnya, maka forum Musrenbang di tingkat lokal bisa menjadi alat untuk memaksa pemerintahan lokal merespon kebutuhan-kebutuhan mendesak rakyat (Salangka, 2020). Proses perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan yang mempertemukan mekanisme perencanaan dari pusat (*top down*) dan perencanaan dari bawah (*bottom up*) yang diselenggarakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Wartika & Fitriyah, 2017 dalam Hasan Basri 2022).

Teknis Simulasi

1. Pembagian Kelompok

Masing-masing kelembagaan merupakan kelompok dalam simulasi, dan anggota kelembagaan adalah anggota kelompok simulasi

2. Musyawarah Kelompok

Masing-masing kelembagaan diberi tugas merumuskan tiga prioritas kegiatan beserta anggaran yang dibutuhkan. Rumusan prioritas kegiatan merupakan refleksi rencana kerja pada tahun 2022. Rumusan tersebut dimusyawarahkan pada tingkat kelompok lalu diputuskan menjadi program kegiatan.

3. Waktu musyawarah kelompok diberikan selama 30 menit

4. Hasil musyawarah kelompok ditulis pada selembar kertas, lalu dikumpulkan ke meja pemateri dibantu moderator untuk mengingatkan bahwa waktu telah selesai. Lembaran kerja harus dikumpulkan.

5. Setelah dikumpulkan, lembaran kerja dikembalikan ke peserta untuk di koreksi silang. Masing-masing kelompok akan mendapat lembaran kerja hasil musyawarah kelompok lain.

6. Masing-masing kelompok membahas dan menilai kelayakan program. Bagian ini diberi waktu 15 menit pembahasan.

7. Hasil pembahasan disampaikan di forum

A. Penyampaian prioritas kegiatan dan anggaran tahun 2022

1. Perangkat Dusun

- a. Studi Tiru ke lampung selatan
- b. Naik tunjangan
- c. Kendaraan roda empat

2. Badan Permusyawaratan Dusun

- a. Peningkatan kapasitas
- b. Operasional
- c. Aspirasi

3. Lembaga Adat Melayu

- a. Pembinaan adat melayu
- b. Sosialisasi adat melayu

4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (tidak hadir)

5. Karang Taruna

- a. Pembangunan stadion mini (1 Milyar)
- b. Pembinaan olahraga (250,000,000)
- c. MTQ tingkat desa (30,000,000)

6. Kaum

- a. Pelatihan pelaksanaan sholat jenazah terutama bagi ibu-ibu
- b. Pembekalan buku pedoman
- c. Fasilitasi waktu sosialisasi dan pemateri

7. PKK
 - a. Pengembangan UMKM (Rp. 50,000,000)
 - b. Pengadaan 1 unit Laptop (Rp. 8,000,000)
 - c. Pengembangan dan pemberdayaan perempuan (Rp. 18,000,000)
 8. Posyandu
 - a. Pembinaan kelompok bina balita
 - b. *Support* dan bantuan kepada balita BGM (Bawah Garis Merah) dan apresiasi balita gizi baik
 - c. Renovasi gedung posyandu
 9. PAUD
 - a. *Outing class* (Rp. 5,100,000)
 - b. *Parenting* (Rp. 3,700,000)
 - c. *Story Teller* (Rp. 1,250,000)
 10. RT.
 - a. Gaji RT
 - b. Penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai)
 - c. Update data penerima PKH (Program Keluarga Harapan)
 11. BUMDES
 - a. Ekonomi dan perdagangan (sembako dan kebutuhan rumah tangga lainnya)
 - b. Jasa pengiriman barang, uang, pinjaman dana usaha dan jaringan internet
 - c. Pengadaan alat dan bahan pertanian
- B. Tanggapan kelembagaan terkait prioritas kegiatan dan anggaran Tahun 2022
1. Perangkat Dusun menanggapi Kaum
 2. Badan Permusyawaratan Dusun menanggapi Posyandu
 3. Lembaga Adat Melayu menanggapi BUMDUS
 4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Tidak hadir)
 5. Karang Taruna menanggapi PKK
 6. Kaum menanggapi perangkat dusun
 7. PKK menanggapi Karang Taruna
 8. Posyandu menanggapi Kaum
 9. PAUD menanggapi Perangkat dusun
 10. RT menanggapi PAUD
 11. BUMDUS Menanggapi RT

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pertama, Teknis Simulasi dapat menumbuhkan kesadaran bahwa semua kelembagaan masyarakat dan lembaga adat memiliki peran masing-masing

sama pentingnya dalam menunjang kinerja pemerintahan dusun. Kedua, mengajarkan bahwa untuk merumuskan program prioritas tidak mudah, perlu musyawarah dalam pengambilan keputusan.

2. Penyampaian prioritas kegiatan dan anggaran tahun 2022, mengajarkan kelompok untuk dapat menyampaikan pokok pikiran didepan publik
3. Tanggapan kelembagaan terkait prioritas kegiatan dan anggaran Tahun 2022, mengajarkan bahwa keputusan yang diambil dapat diuji akuntabilitasnya

Saran

4. Teknis Simulasi sebaiknya menjadi model dalam pengambilan keputusan
5. Penyampaian prioritas kegiatan dan anggaran tahun 2022, sebaiknya disertai penjelasan kuantitatif dan kualitatif
6. Tanggapan kelembagaan terkait prioritas kegiatan dan anggaran Tahun 2022, mekanisme ini dapat terus dilanjutkan untuk meningkatkan akuntabilitas public

DAFTAR PUSTAKA

- Kriswanto, 2021. *Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lkd) Untuk Meningkatkan Potensi Pendapatan Desa Di Kabupaten Pandeglang*. J-PeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia ISSN Volume 02, No. 01 Thn 2021. p - ISSN : 2746-4164 (Printed) <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jphi>
e - ISSN : 2746-4172 (Online)
- Hasan basri, 2023.*et.all. Partisipasi Masyarakat Dalam Merumuskan Kebijakan Pada Musrenbang Kampung*. Jurnal kebijakan public vol.13 No 1 tahun 2022. p-ISSN 1978-0680, e-ISSN 2655-5204. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>